

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN APBD 2010 DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS: URUSAN PENDIDIKAN)**

Tio Minar Sihombing

dan

Drs. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax
(0761) 63277

Abstract: APBD is accountability instrument to public fund management and programme application that is paid by public. Simply, it can be said that public budget described economy condition from organization that includes information about outcome, budget, and activity. The researcher used key informants. The researcher used Pekanbaru Head of Education Department as key informants in this study. From key informants are going to be received the continuation of informants: they are consist of education department staff that is in charge of budget authorities and DPRD members in budget. The reseacher used snowball sampling method. In this research is known the factors that influenced the APBD accountability Pekanbaru are lacking the highest loyalty in doing the main task and function and perception factors among the public is not going well.

Keywords: *Budgeting control (APBD), Good Governance, Accountability*

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma baru yang mengubah konsep dan kewenangan daerah yang semula diajukan atas dasar porsi kebijakan pusat dan daerah selanjutnya menjadi kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Perubahan ini menurut kemandirian daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan menempuh berbagai strategi, alokasi dan prioritas pengeluaran sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dan pengeluaran daerah harus mampu menghilangkan kesan terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran daerah yang dilakukan pelayan publik sebagai sektor publik dalam melakukan tupoksi masing-masing. Pelayanan publik dalam pengertian *Good Governance* merupakan salah satu wujud yang penting, beberapa kata kunci pelayanan publik yaitu pedoman penyelenggaraan, standar pelayanan minimal, akuntabilitas, transparansi, dan standar pelayanan. ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu *publik service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). Kegagalan dalam melakukan fungsi tersebut akan berdampak terhadap pemerintah itu sendiri maupun kehidupan masyarakat. Seringnya terjadi kinerja pelayanan publik diprotes antara lain disebabkan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi

pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

APBD merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anggaran publik menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

APBD Pekanbaru telah melahirkan beberapa peraturan terkait dengan penjabaran APBD setiap tahunnya. Belanja daerah yang dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Apa itu Biaya Pendidikan, Dana Pendidikan dan Pendanaan Pendidikan? (a) Biaya pendidikan adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan pendidikan. (b). Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. (c). Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Siapa penanggung jawab pendanaan pendidikan? Dalam konteks pendidikan nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dan masyarakat (penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan). Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBD. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komponen Yang Boleh Dimasukkan dalam Perhitungan anggaran pendidikan 20 persen, adalah: (1) prasarana (bangunan), (2) penyediaan guru, (3) pelatihan guru yang ada agar dapat memenuhi syarat kompetensi sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, (4) penyediaan buku dan alat peraga bagi hampir semua sekolah, (5) menyempurnaan sistem pengawasan dan evaluasi sekolah, (6) penyesuaian kurikulum pada keadaan lokal, (7) penyediaan dana penyelenggaraan yang wajar dan cukup, (8) perkuatan dinas-dinas pendidikan di seluruh kabupaten/kota.

Urusan pendidikan dan kebudayaan merupakan bidang yang terkait langsung dengan pencapaian misi keempat dari Kota Pekanbaru yaitu “meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan pendidikan umum dan agama yang berkualitas dan terjangkau, pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu serta penanganan masalah sosial”. Untuk tahun 2010 pemerintah kota pekanbaru telah mengalokasikan dana sebesar Rp 186.120.221.560,- untuk melaksanakan 11 sasaran, 13 program, dan 80 kegiatan. Alokasi dana ini menyerap 27,21 % dari keseluruhan belanja langsung sebesar Rp

683.999.847.332,-. Unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan urusan ini yaitu Dinas Pendidikan Dan Kantor Perpustakaan Dan Arsip. (LAKIP Kota Pekanbaru 2010)

Tabel 1.4. Ringkasan Program Dan Sasaran Tahun 2010 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Yaitu Sebagai Berikut:

PROGRAM	SASARAN
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	b. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana, Kreativitas Guru Dan Peserta PAUD
c. Peningkatan Disiplin Aparatur	c. Meningkatnya Kualitas SDM Yang Putus Sekolah
d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	d. Meningkatnya Persentase Lulus Peserta Didik
e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	e. Meningkatnya Penduduk Yang Dapat Menyelesaikan Program Wajib Sembilan Tahun
f. Pendidikan Anak Usia Dini	f. Meningkatnya Penduduk Yang Dapat Menyelesaikan Program Wajib Sembilan Tahun
g. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	g. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan
h. Pendidikan Menengah	h. Meningkatnya Partisipasi Penduduk Yang Mengikuti Pendidikan Menengah Dan Perguruan Tinggi
i. Pendidikan Non Formal	i. Meningkatnya Kretaitivas Dan Pembinaan Tenaga Pengajar Pada Lembaga Pendidikan Non Formal
j. Pendidikan Luar Biasa	j. Pembinaan Forum Masyarakat Peduli
k. Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	k. Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Sumber : LAKIP Kota Pekanbaru 2010

Tabel 1.5. Ringkasan Pencapaian Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan 2010 Kota Pekanbaru Sebagai Berikut:

PENCAPAIAN	KENDALA
a.melaksanakan pelayanan administrasi kearsipan serta dokumentasi dan hubungan masyarakat, instansi dan sekolah yang ada di Kota Pekanbaru	A.Secara Umum Sumber Daya Manusia Sebagai Tenaga Pengelolah Administrasi Belum Mendukung Dikarenakan Kurangnya Pelatihan Untuk Staf.
b. mencatat seluruh surat masuk dan keluar kedalam buku agenda: surat masuk: 9.102 surat, surat keluar: 18.025 surat	B.Dana Operasional Sekolah Mulai Dari TK, SD, SMP, SMA Masih Belum Memadai, Sehingga Kemungkinan Akan Memperkecil Ruang Lingkup Sekolah Dalam Melaksanakan Kegiatan.
c.menzalurkan dana dan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk TK: TK Negeri: 3 Sekolah, TK Swasta: 250 Sekolah	C.Program Penuntasan Wajar Belum Dapat Optimal Dikarenakan Pertumbuhan Penduduk Usia (13-15 Tahun) Cukup Tinggi Dan Adanya Mobilitas Penduduk Dari Kabupaten Disekitar Kota Pekanbaru Ke Kota Pekanbaru Serta Pendapatan Yang Wajar Belum Didukung Dengan Dana.
d. menyalurkan dana Ujian Ukhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN) SD yang berasal dari dana APBD Kota: SD Negeri 184 Sekolah, SD Swasta: 58 Sekolah	D.Masih Adanya Sekitar (20%) Prasarana Dan Sarana Pendidikan Pada Sekolah Dasar Rusak Berat, Yang Berpengaruh Kepada Kenyamanan Dan Kegairahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Di Sekolah Dan Ada Beberapa SD Yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah. Usul Penghapusan Asset Gedung Sekolah Yang Sudah Tidak Layak Pakai Belum Terealisasi.
e. menyalurkan dana bantuan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru tingkat SMP/MTs Negeri dan Swasta untuk 13665 siswa.	E.Pelaksanaan Pengembangan Seni Budaya Belum Dapat Terlaksana Dengan Baik Karena Pada Umumnya Sekolah Belum Memiliki Prasarana, Sarana Kesenian Yang Memadai Dan Belum Didukung Dengan Dana Untuk Mengadakan Kegiatan.
f.melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan kompetensi guru SMP melalui MGMP berjumlah 340 orang per mata pelajaran (Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA,IPS,PKn,Agama Islam, dan Seni Budaya)	F.Kepengawasan Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Belajar Dan Mengajar Mulai Dari Tingkat TK,SD,SMP, SMA Dan SMK Belum Berjalan Optimal, Karenanya Kurangnya Pengawas Mata Pelajaran Dan Rumpun Mata Pelajaran Untuk SMP,SMA Dan SMK (Rasio Pengawas/ Guru Belum Sesuai).
g. melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	G.Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UPTD Pendidikan Belum Ada Yang Berpengaruh Terhadap Tupoksi.

Sumber: Laporan Tahunan Tahun 2010 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Melihat dari tabel diatas bahwa dalam pencapaian target masih ada permasalahan atau kendala, sementara dilihat dari anggaran Alokasi dana untuk pendidikan menyerap 27,21% dari keseluruhan belanja langsung sebesar Rp 683.999.847.332.- , Persentase ini sudah melampaui angka yang diamanatkan oleh Undang- undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yaitu sebesar 20% dari total anggaran. Seharusnya dengan alokasi dana sebesar 27,21% permasalahan atau kendala sudah dapat diatasi atau dapat dikatakan sudah tidak adalagi. Terutama pada kendala nomor G kita melihat bahwa Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UPTD Pendidikan belum ada yang berpengaruh terhadap Tupoksi, bagaimana mungkin pertanggungjawaban dapat dilakukan jika strukturnya tidak berjalan dengan semestinya ? Dan apakah dapat dipertanggungjawabkan? Laporan pertanggungjawaban yakni keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut mengelola sumberdaya yang tersedia untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat fenomena-fenomena diatas, isu ini peneliti angkat dan sajikan kedalam suatu penelitian dengan judul: **“Akuntabilitas Penggunaan APBD 2010 Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Urusan Pendidikan)”**

Masalah dalam hal ini adalah Bagaimana akuntabilitas penggunaan APBD 2010 di Kota Pekanbaru? Apa faktor- faktor yang mempengaruhi akuntabilitas penggunaan APBD 2010 di Kota Pekanbaru? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan APBD 2010 di Kota Pekanbaru untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas penggunaan APBD 2010 di Kota Pekanbaru.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan suatu daftar/ penjelasan terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah untuk jangka waktu tertentu **Ritonga Dkk (2003: 129)**. Menurut **Nirzawan dalam Halim (2004:68)** mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah menyangkut lima aspek yang harus diperhatikan:

- a. Pengelolaan seluruh sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan, dan penghematan yang mungkin dilakukan.
- b. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif
- c. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat
- d. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisien dan efektif.
- e. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam Permendagri No. 26 tahun 2006 disebutkan bahwa belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD harus mempedomani hal-hal sebagai berikut.

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sulistoni (2003) pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif.

Mardiasmo (2002) dalam bukunya (**Ellwood 1993**) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu : (1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*Accountability for probity and legality*), (2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), (3) Akuntabilitas program (*program accountability*), (4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Menurut **Mas Achmad Daniri** dalam bukunya *Good Corporate Governance (2005)* akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif mengingat stakeholders ini merupakan pihak yang berperan penting dalam menuntut akuntabilitas atau pertanggungjawaban manajemen terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh bagi perusahaan.

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

1. Tujuan pelaporan keuangan sektor publik

Menurut public sector committee- IFAC, tujuan pelaporan keuangan sektor publik dapat dipilah dalam :

- a. Tujuan secara umum
 1. Memberikan informasi yang bermanfaat
 2. Memenuhi kebutuhan pemakai
- b. Tujuan secara khusus

1. Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum
2. Mengidentifikasi sumberdaya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang telah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.
3. Menyediakan informasi tentang sumber daya alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
4. Menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas
5. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi komitmen dan kewajibannya.
6. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahannya organisasi sektor publik
7. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi performansi organisasi sektor publik terutama yang terkait dengan biaya operasi efisiensi dan pencapaian target.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan*. Peneliti menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai *key informan* atau informan kunci. Dari *key informan* tersebut akan diperoleh informan-informan susulan yaitu terdiri dari pegawai dinas pendidikan yang kaitannya sebagai pemegang kekuasaan anggaran dan anggota DPRD di bagian anggaran. Peneliti menggunakan metode *snowball sampling* atau bola salju, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pihak atau orang yang memang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan apabila dalam proses pengumpulan data sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi, maka proses pengumpulan informasi sudah dianggap selesai.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data Primer yakni data yang diperoleh dari informan dengan observasi/ survey dan wawancara berstruktur yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan untuk melengkapi informasi mengenai penelitian yang dilaksanakan, yaitu: monografi tempat penelitian serta laporan Pertanggungjawaban yang telah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru dan dokumen pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota pekanbaru Tahun anggaran 2010 serta laporan pertanggungjawaban dari dinas pendidikan kota Pekanbaru bahkan untuk mendukung dan menjelaskan masalah diperlukan peraturan-peraturan, lampiran data, bahkan foto. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain wawancara (*interview*) yakni mengadakan wawancara langsung terhadap informan mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni Akuntabilitas penggunaan APBD 2010 di Kota Pekanbaru (studi kasus urusan pendidikan). Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan

Akuntabilitas penggunaan APBD 2010 di Kota Pekanbaru (studi kasus urusan pendidikan). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini dikaji secara deskriptif, artinya penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada yang didukung dengan dilakukannya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian data-data tersebut dianalisa sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deskriptif pula.

HASIL

Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada publik karena pemerintah dibentuk/ dibuat oleh publik dan untuk publik.

1. Akuntabilitas kebijakan

Adalah terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah Pekanbaru atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPRD dan masyarakat luas.

a. Akses APBD

Melihat dari beberapa wawancara dan penggalian informasi dilapangan mengenai akses APBD di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan sudah melakukan sistem transparansi tentang kemudahan dalam pengaksesan tetapi belum sepenuhnya dilakukan secara total yaitu tidak menyediakan prasarana yang lengkap untuk masyarakat lebih mengetahuinya secara menyeluruh.

2. Akuntabilitas program

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

a. Ekonomis

Dari wawancara dan penggalian informasi dilapangan diketahui bahwa pemerintah dalam penyusunan anggaran cukup ekonomis, hal ini dibuktikan dengan kondisi besarnya anggaran yang terdapat di Dinas Pendidikan digunakan untuk publik, dengan kondisi yang setiap tahun mengalami kenaikan persentase untuk urusan pendidikan itu sampai 38 % pada tahun 2012 dengan berlandaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Efisiensi

Dari wawancara dan penggalian informasi dilapangan diketahui bahwa masih belum transparannya pemerintah dalam melakukan tupoksi masing-masing yaitu Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UPTD Pendidikan Belum Ada Yang Berpengaruh Terhadap Tupoksi. Melihat dari hasil diatas maka pihak pengguna anggaran mengenai urusan pendidikan belum maksimal.

3. Akuntabilitas proses

Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hak kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

a. Penyajian informasi

Berdasarkan dari beberapa wawancara dan penggalian informasi dilapangan mengenai penyajian informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah atau dinas pendidikan sudah transparan, namun kembali lagi konsep transparan itu sendiri dimana tidak ada yang ditutupi semuanya terbuka, dan ini belum terlihat dalam penyampaian informasi mengenai pelaporan evaluasi/akuntabilitas APBD, dimana dinas pendidikan belum memberikan informasi terkait APBD kepada masyarakat luas baik dari proses penyusunan hingga pelaporan evaluasi secara transparan dan rinci. Informasi yang diberikan oleh pemerintah hanya garis besarnya saja itupun setelah APBD di sahkan dimana yang disampaikan kepada publik melalui media berupa total APBD, dan dapat kita ketahui dari hasil wawancara mengenai penyajian informasi dan kemudahan akses APBD itu bahwa prinsip transparan memang belum berjalan baik, sehingga dengan demikian masyarakat tidak bisa mengukur sejauh mana pihak eksekutif sebagai wakil mereka dalam menyampaikan aspirasi dan dapat menjawab persoalan yang mereka hadapi.

b. Pengawasan

Melihat temuan dilapangan bahwa masih adanya penyelewengan dalam pengerjaan tupoksi mengenai urusan pendidikan, berarti dalam pengawasan hanya mengenai pos anggaran saja yang diawasi tidak melihat bagaimana pengguna anggaran itu dalam melakukan fungsinya sebagai sebuah struktur kerja. Jadi pengawasan secara mendalam dan secara intern untuk urusan pendidikan ini belum baik. Dengan adanya pengawasan berarti semua kegiatan yang dilakukan sudah ada yang memantau sehingga semua pihak yang bekerja tidak menurut diri sendiri tetapi ada aturan yang harus dipatuhi.

4. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Melihat dari wawancara diatas maka kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran penyalahgunaan jabatan sudah dilakukan dengan cukup baik, dan dari penemuan dilapangan dijumpai tidak adanya orang yang ditahan akibat pelanggaran hukum. Walaupun penemuan yang di dapat oleh peneliti masih adanya struktur organisasi tata kerja (SOTK) masih ada yang belum berpengaruh terhadap tupoksi masing-masing, Melihat dari hasilnya maka dapat dikatakan pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan pemerintah saat itu. Jika hal ini dikaitkan dengan perspektif fungsional akuntabilitas, maka baru tahap *probity and legality accountability (compliance)* yang dipenuhi, dalam kaitannya dengan penjelasan di atas, akuntabilitas pemerintahan di Pekanbaru terutama dalam hal urusan pendidikan baru sebatas tahap kepatuhan atau *compliance*.

2.faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas penggunaan APBD 2010 tentang urusan pendidikan.

a. Loyalitas

loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau dituntut kepada seorang atau lembaga, yang didalamnya terdapat rasa cinta dan tanggungjawab untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik,

Dari wawancara penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa individu pengelola/pengguna anggaran tidak loyal dalam menjalankan amanat yang diberikan rakyat untuk mengelola/menggunakan uang mereka, hal ini terlihat bahwa dalam penggalan informasi terhadap responden, mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui secara jelas tugas mereka namun itu hanya sebatas pengetahuan saja, tidak mereka terapkan dengan benar didalam pelaksana anggaran yaitu terbukti dengan masih adanya pelayan publik yang belum berpengaruh pada tupoksi. Sementara tugas dari seorang sektor publik merupakan pelayanan publik, beberapa kata kunci pelayanan publik yaitu pedoman penyelenggaraan, standar pelayanan minimal, akuntabilitas, transparansi, dan standar pelayanan, itu artinya harus mengedepankan kepentingan masyarakat secara utuh.

b. Persepsi

Akuntabilitas Penggunaan APBD maka dapat diketahui bahwa persepsi/cara pandang pengelola anggaran dapat mempengaruhi Akuntabilitas APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mempengaruhi tujuan APBD dimana persepsi merupakan proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan.

Persepsi/cara pandang yang berbeda antar pengelola/pelaksana anggaran tentunya sangat mempengaruhi Akuntabilitas Penggunaan APBD yang berorientasi pada masyarakat, persepsi yang salah atau tidak tepat tentunya akan mempengaruhi tercapainya kebutuhan masyarakat dimana pemerintah mengalokasikan berdasarkan dari persepsi/cara pandang mereka yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, mengenai akuntabilitas penggunaan APBD di kota pekanbaru maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan sebagai kesimpulan dalam penulisan ini yaitu: Akuntabilitas penggunaan APBD 2010 Kota Pekanbaru dalam urusan pendidikan belum optimal, hal ini dapat dilihat dimana pemerintah belum bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melihat kemana saja uang mereka dipergunakan. Dan dapat juga ditemui bahwa masih ada Struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang belum berpengaruh terhadap tupoksi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas penggunaan APBD 2010 kota pekanbaru yaitu loyalitas dan persepsi. Dalam struktur kerja penggunaan anggaran, pemerintah kurang loyal terhadap tanggungjawab yang di emban mereka, dengan adanya

permasalahan bahwa masih adanya SOTK yang belum berpengaruh terhadap tupoksi nya, dengan adanya data ini maka dapat kita katakan bahwa sturuktur dalam akuntabilitas penggunaan APBD masih belum dilakukan dengan baik. Serta tidak adanya kemudah bagi masyarakat untuk mudah mengakses penggunaan APBD ini maka dapat dikatakan kurang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, Mas Achmad, 2005. *Good Corporate Governance*. Gloria Printing: Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntabilitas dan Pengendalian Keuangan Daerah*. AMP YPKN: Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Ritonga, dkk, 2003, *Pelajaran ekonomi*. Erlangga: jakarta
- Sulistoni, G, 2003, *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*. SOMASI: Nusa Tenggara Barat
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.